RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PRKPP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang memuat Visi dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dan keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Nganjuk, 27 Juli 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		**i**
Daftar Isi		**ii**
Daftar Tabel		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK**	**7**
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	32
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK**	**34**
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	39
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	48
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	**54**
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	**58**
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	**59**
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	**92**

7.1 Indikator Kinerja Utama 92
7.2 Indikator Kinerja Kunci 93
PENUTUP **94**

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Administrasi personil menurut golongan	21
Tabel	2.2	Data Administrasi personil menurut Pendidikan	21
Tabel	2.3	Data Administrasi personil menurut Jabatan	22
Tabel	2.4	Data Sarana dan Prasaran	22
Tabel	II.3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2019-2021	25
Tabel	II.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	26
Tabel	II.3.3	Formulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan	31
Tabel	IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	56
Tabel	V.1	Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan	58
Tabel	VI.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2021	59
Tabel	VI.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2023	64
Tabel	VII.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023	92
Tabel	VII.2	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019-2023	93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing Perangkat Daerah yang ada dalam lingkup pemerintah daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk merupakan Organisasi Pemerintah yang terbentuk pada awal tahun 2017. Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menangani beberapa urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menangani bidang urusan perumahan dan kawasan

permukiman serta urusan pertanahan. Oleh karena itu diperlukan Perubahan Rencana Strategis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023.

Perubahan Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Nganjuk. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.

Berpedoman pada visi, misi, tujuan daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta perbaikan hasil konsultasi Ranwal Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 maka penyusunan Rencana Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Tahun 2018-2023 memperhatikan ketentuan tersebut. Selain itu berorientasi pada tercapainya visi, misi, dan tujuan melalui penyelarasan dengan sasaran, strategi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
9. Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Permenegpera Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
16. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan kerangka kebijakan strategis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang bidang Perumahan serta fungsi penunjang bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah.

Adapun tujuannya adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama tahun 2018-2023;
- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dinas;
- Menjadi acuan kinerja bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan fungsi penunjang bidang perumahan serta bidang Kawasan permukiman dan pertanahan;
- Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan terhadap Renstra Provinsi Jawa Timur
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

A. Indikator Kinerja Utama
B. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk dinas daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok**

   Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2. **Fungsi**

   Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

   a) Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
c) Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
e) Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
f) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

1. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

   Sekretariat mempunyai fungsi:

   a. Pelaksana koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a) menyiapkan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
d) menyiapkan dan melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
e) menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
f) melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
g) melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
h) menyiapkan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
i) menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
j) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) melaksanakan urusan persuratan;
b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f) melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang–undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan

kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat;

c. Perencanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
d. Pelaksanaan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
e. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
f. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
g. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan /atau rumah khusus;
h. Penerbitan ijin pengembangan dan pembangunan perumahan;
i. Penerbitan sertifikat ijin kepemilikan gedung (SKGB);
j. Peningkatan prasarana sarana utilitas umum (PSU);
k. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan rakyat;
l. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
m. Pelaksanaan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) umum tingkat kemampuan kecil;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Penyediaan Perumahan Akibat Bencana dan Dampak Pembangunan.

Seksi Penyediaan perumahan Akibat Bencana dan Dampak Pembangunan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten;
b) Melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
c) Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
d) Melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
e) Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota;
f) Melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
g) Melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
h) Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
i) Melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisame akses perumahan KPR-FLPP;
j) Melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator;
k) Melaksanakan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana;
l) Melaksanakan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan;
m) Melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
n) Melaksanakan penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;

o) Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
p) Melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana;
q) Melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta prasaran, sarana dan utilitas (PSU) bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
r) Melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana Kabupaten atau relokasi program Kabupaten;
s) Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana Kabupaten atau relokasi program Kabupaten;
t) Melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota;
u) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
v) Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus; dan
w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
b) Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;

c) Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
d) Melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
e) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
f) Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum;
g) Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas

Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan Penyediaan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan;
b) Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
c) Melaksanakan koordinasi Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
d) Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi

Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil; dan

e) Melaksanakan tugas-tuas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang permukiman dan pertanahan.

Bidang Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
b. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
c. penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
d. penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
e. pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
f. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
g. penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan ijin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
h. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
i. penerbitan ijin membuka tanah;
j. penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Kabupaten;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

   Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

   a) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
   b) penyusunan dan/ atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
   c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;dan
   d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penataan dan peningkatan kawasan permukiman

   Seksi Penataan dan peningkatan kawasan permukiman mempunyai tugas:

   a) Melaksanakan survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh;
   b) Menyusun rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
   c) Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;

d) Melaksanakan kegiatan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
e) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
f) Melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
g) Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
h) Menyusun rencana tapak (site plan) dan detail enginnering design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
i) Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
j) Melaksanakan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
k) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
l) Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh; dan
m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
b) Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
c) Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
d) Melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
e) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten;
f) Melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
g) Melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah;
h) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agrarian dalam 1 (satu) Kabupaten;
i) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten;
j) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong didalam 1 (satu) daerah provinsi;
k) Melaksanakan inventarisasi tanah kosong;
l) Melaksanakan pemanfaatan tanah kosong;
m) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah;
n) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;

o) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
p) Melaksanakan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
q) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten;dan
r) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

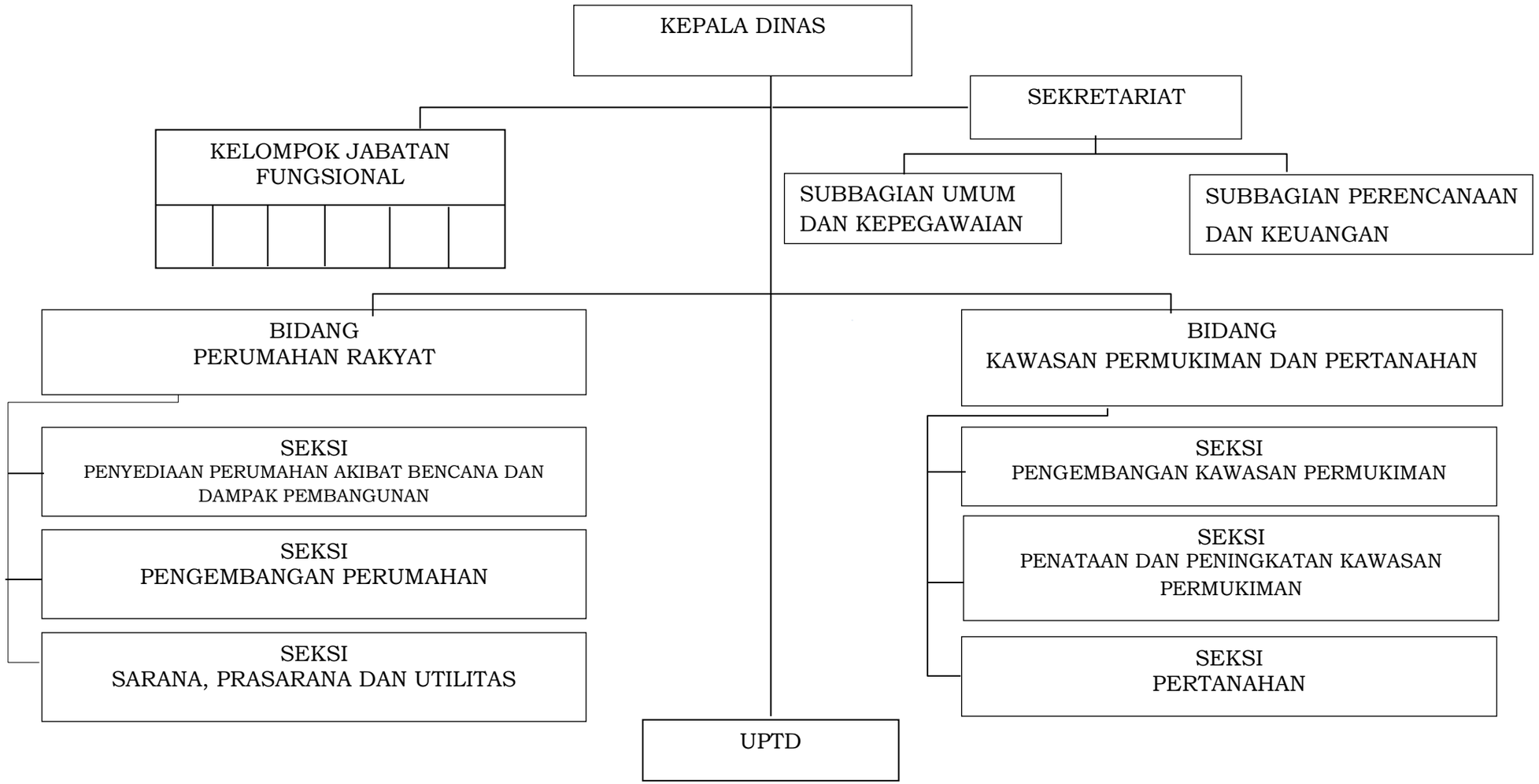
3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
   1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
   1) Seksi Penyediaan Perumahan Akibat Bencana dan Dampak Pembangunan;
   2) Seksi Pengembangan Perumahan;
   3) Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas
d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
   1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
   2) Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman;
   3) Seksi Pertanahan.

Dari susunan organisasi di atas, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat di jabarkan pada bagan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK



II.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Personil :

Tabel II. 2.1
Data Administrasi Personil
Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	10
2. Golongan II	Orang	23
3. Golongan III	Orang	20
4. Golongan IV	Orang	4
5. Non ASN	Orang	16
Jumlah	Orang	73

Data : per Des 2021

Tabel II.2.2
Data Administrasi Personil
Menurut Pendidikan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. SD dan SLTP	Orang	12
2. SLTA	Orang	27
3. D2	Orang	1
4. D3	Orang	3
5. SI	Orang	25
6. S2	Orang	5
7. S3	Orang	-
Jumlah	Orang	73

Data : per Des 2021

Tabel II.2.3
Data Administrasi Personil
Menurut Jabatan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	3
3. Eselon IV	Orang	9
4. Jabatan Fungsional	Orang	-
5. Staf	Orang	44
6. THL	Orang	16
Jumlah	Orang	73

Data : per Des 2021

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel II.2.4
Data Sarana dan Prasarana

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Mobil Dinas	Unit	4
2	Sepeda motor	Unit	11
3	Tanah	Bidang	2
4	Bangunan Gedung	Unit	2

Data : per Des 2021

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor

28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menangani bidang urusan perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan pertanahan.

Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai RENSTRA tahun 2018 – 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel II.3.1
Target,Realisasi dan Capaian Tahu 2019-2021
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPRKPP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	*81,77*			81,26	82,31	83,36	84,41	85,46	*96,63*	*95,68*				*95,86*	*116,24*			
2	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota				58,25	61,14	64,03	66,92	69,81	*55,38*	*53,21*				*95,02*	*87,03*			
3	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan				86,87	88,28	89,69	91,1	92,51	*77,48*	*77,78*				*89,19*	*88,11*			
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	*60*			76,95	78,2	79,45	80,7	81,95	*74,97*	*75,18*				*97,43*	*96,14*			
5	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau				88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	*87,26*	*86,95*				*98,09*	*95,86*			

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740,95	384,01				591,16	320,15				79,78	83,37				562,48	455,655
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1545	482,84				1471,35	381,69				95,23	79,05				1013,92	926,52
3	Program peningkatan disiplin aparatur	7,2	2,4				7,2	2				100	83,33				4,8	4,6
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30	30				27,67	28,67				92,24	95,55				30	28,17
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/ Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	6.208,75	9.717,40				5.200,52	8.767,55				83,76	90,23				7963,075	6984,035

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
6	Program Lingkungan Sehat Permukiman/ Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	19.434,52	11.279,55				17.803,17	10.289,25				91,61	91,22				15357,035	14046,21
7	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	300					297,38					99,13					300	297,38
8	Program Peningkatan Kinerja UPTD	200	83,85				115,47	55,02				57,73	65,62				141,925	85,245
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum			4.935,40					4.046,17					81,98%			4937,2	4.046,17
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			3.676,60					3.551,25					96,59%			3676,6	3.551,25
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			3.774,15					3.330,71					88,25%			3774,15	3.330,71

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
12	Program Penyelenggaraan Jalan			26.602,92					25.746,12					96,78%			26.602,92	25.746,12
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.825,71	7.345,35				6.290,97					92,17%			7.085,53	6.290,97
14	Program Pengembang Perumahan			17.324,99	1.818				12.358,96					71,34%			9.571,50	12.358,96
15	Program Kawasan Permukiman			3.574,57	1.260,39				3.139,64					87,83%			2.417,48	3.139,64
16	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			4.200	5.720,87				3.903,74					92,95%			4.960,44	3.903,74
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			676,28	1.268,28				444,69					65,76%			972,28	444,69

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
18	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				13,71												13,71	
19	Program Penatagunaan Tanah				691,00												691,00	

Pengukuran kinerja pelayanan tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja SKPD.

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase target penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan sampai dengan tahun 2020 sebesar 82,31%, dengan realisasi sebanyak 1.056.227 jiwa atau sebesar 95,68 % dari total jumlah penduduk Nganjuk yang sebanyak 1.103.902 jiwa sehingga capaian kinerja indikator persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih adalah sebesar tercapai 116,24%.
2. Persentase target jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2020 sebesar 61,14 %, dengan realisasi sebanyak 587.376 jiwa atau sebesar 53,21% dari total jumlah penduduk Nganjuk yang sebanyak 1.103.902 jiwa sehingga capaian kinerja indikator persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota adalah sebesar tercapai 87,03 %.
3. Persentase target pemenuhan drainase lingkungan sampai dengan tahun 2020 adalah 88,23 %, dengan realisasi penduduk perkotaan yang terlayani drainase lingkungan sampai dengan tahun 2020 adalah 316.040 Jiwa atau 77,18 % sehingga capaian kinerja sebesar 88,11 %.

4. Persentase target pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan sampai dengantahun 2020 sebesar 78,20 %, dengan realisasi panjang jalan lingkungan yang dibangun/tersedia sampai dengan tahun 2020 sepanjang 2.056,795 km atau sebesar 75,18 % dari total panjang jalan lingkungan yang dibutuhkan tahun 2020 sehingga capaian kinerja sebesar 96,14 %

   - Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 5,64 km.

5. Persentase target pengurangan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 25 % dengan realisasi seluas 6,6 Ha atau sebesar 5,03 % dari total 131,2 Ha luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020. Capaian kinerjanya adalah sebesar 20,12 %.

6. Persentase target rumah layak huni yang difasilitasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar 90,71 %, realisasi jumlah rumah layak huni sampai akhir tahun 2020 adalah 281.124 unit atau 86,95 % sehingga capaian kinerja sebesar 95,86 %.

   Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 untuk mencapai indikator sasaran Persentase rumah layak huni adalah:

   - Program BSPS, hasilnya pemugaran rumah sebanyak 408 unit.
   - Pemugaran rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 234 unit
   - DAK bidang Perumahan sebanyak 143 unit.

Tabel II.3.3
Formulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	2019		2020	
			Jumlah	Capaian %	Jumlah	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan (jiwa)	913.562	86,63	1.056.227	95,68
		Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)	1.054.611		1.103.902	
2.	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota	Jumlah Penduduk Terlayani MCK Komunal (jiwa)	584.029	55,38	587.316	53,20
		Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)	1.054.611		1.103.902	
3.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	313.560	77,48	316.040	77,78
		Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)	404.723		406.342	
4.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun (Km)	5.051,16	74,97	2.056,80	75,18
		Panjang Jalan lingkungan yang dibutuhkan (Km)	2.736		2.736	
5.	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Unit)	321.317	87,26	281.204	86,98
		Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	280.366		323.305	

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Ketersediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Nganjuk yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Nganjuk khususnya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah Rumah Fasilitasi Layak Huni dan Lingkungan Permukiman yang memadai.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Tingginya angka backlog Perumahan di Kabupaten Nganjuk dengan pendekatan konsep hunian = (29.924 Unit) sedangkan dari konsep Kepemilikan = (236.700 unit) .
2. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Nganjuk (85.233 unit).

3. Tingginya Permintaan Penyediaan Rumah Layak Huni yang terjangkau.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan memadai.
5. Banyaknya Aset tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat.

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Adanya Perusahaan Pengembang/Developer Perumahan dari Kabupaten Nganjuk.
3. Harga Tanah yang relatif terjangkau.
4. Upah kerja dan harga material bahan bangunan yang relatif terjangkau.
5. Pendanaan dari APBD disektor Perumahan dan Permukiman.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Perumahan dan Permukiman	a	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	1	Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
				2	Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
				3	Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				4	Lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya kunci perumahan
				5	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
				6	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
		b	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh	1	Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
				2	Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
				3	Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
				4	Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman
		c	Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dikawasan tertinggal, dan dikawasan pinggiran hutan di perdesaan.		

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
		d	Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba		
		e	Kurangnya penyiapan dan penyediaan lahan untuk perumahan yg dikelola oleh pemerintah daerah		
		f	Masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung, terutama di daerah rawan Bencana yang berpenghuni		

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Terbatasnya Alokasi Pagu Anggaran;

b. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman;

c. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT;

d. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang dan asset;

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah :

" Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya yang didukung pengembangan kebanggaan terhadap kesenian dan kebudayaan berbasis kearifan lokal serta teknologi tepat guna.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasakan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Misi 6 :

"Insfrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Perlindungan dari Bencana"

Visi : ***" Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"***				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6 : Insfrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Perlindungan dari Bencana	- Kurangnya peningkatan PSU,Rumah Layak Huni dan Fasum - Belum meratanya hasil pembangunan Bidang Perumahan Rakyat kawasan permukiman	- Terbatasnya alokasi Anggaran - Rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan bidang perumahan dan permukiman	- Semangat dan kinerja yang tinggi

III.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

a. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020) Agenda prioritas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah : *Pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.*

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi 67nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatanpelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan
2. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman

yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Kebijakan yang bersifat manajerial :

1. Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
2. Untuk meneningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan,

peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan infrastruktur wilayah

- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program.
- Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik diperkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi :

a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi :

1) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan

infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;

2) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
3) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR Pulau/Kepulauan;
4) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
5) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
6) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
7) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.

b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
1) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau / kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
2) Evaluasi kinerja keterpaduan;
3) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan.

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Sasaran Strategisnya :

a) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
b) Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

2. Penyediaan Perumahan

Sasaran Strategisnya :

a) Pembangunan Rumah layak huni
b) Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya
c) Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung
d) Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

3. Pembiayaan Perumahan

Sasaran Strategis :

a) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
b) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

C. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

- Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Strategi :

1) Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurer sehingga dapat menjadi agent of change untuk meningkatkan kapasitas manajemen;
2) Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN;

3) Peningkatan kualitas hasil pengawasan;
4) Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi.

• Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Strategi :

1) Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaanumum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance;
2) Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaanumum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance;
3) Peningkatan citra positif kementerian di mata publik;
4) Peningkatan kualitas pengelolaan BMN;
5) Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum;
6) Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian;
7) Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;
8) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi : a. Peningkatan kualitas pelayanan publik

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

  Strategi :

  1) Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur;
  2) Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerjaindividu khususnya terhadap kinerja organisasi ;
  3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  4) Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR.

- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

  Strategi :

  1) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2) Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalahmasalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemamputerapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

b. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”.

Misi 3:

“Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang".

Sesuai Misi 6 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana telah selaras dengan Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

Sedangkan RENSTRA Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG LEBIH BERKEMBANG DAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN”

Pembangunan bidang ke cipta karyaan yang lebih menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur permukiman dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk mewujudkan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dansasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Adapun strategi diantaranya:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layakkhusunya bagi masyarakat miskin dan masyarakatberpenghasilan rendah.
2. Pembangunan Sarana Utilitas (PSU)
3. Menyelengaarakan studi-studi inventarisasi potensi, dan permasalahan serta kebutuhan infrastruktur permukiman.
4. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
5. Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air
6. Pengembangan sistem penyediaan air minum regional
7. Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM.
8. Pengembangan sistem pengolahan air limbah
9. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah
10. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase
11. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase.

Arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan nya meliputi:

1. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
2. Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
3. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
5. Pembangunan sapras penyediaan air minum di daerah rawan air
6. Penyusunan peraturan pengelolaan Air Minum
7. Pembinaan penyelenggaraan SPAM

8. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
9. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
10. Memberikan bantuan teknis kepada kelompok pengelola sarana air limbah kategori sakit
11. Pembinaan pengelolaan sarana air limbah
12. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan inrastruktur
    permukiman
13. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawanbanjir
14. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase
15. Pembinaan Pengelolaan Drainase

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis Kabupaten yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041. RT RW Kabupaten digunakan sebagai dasar untuk menetapkan indikasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

RTRW Kabupaten Nganjuk secara umum ditetapkan pada 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Peruntukan Lindung terdiri dari 5 jenis kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi 7 kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan

pertambangan, kawasan peruntukkan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan peruntukkan pemukiman.

Kebijakan penataan ruang di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kawasan permukiman;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air serta pengendalian lingkungan yang mendukung pengembangan pemanfaatan ruang lokasi industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diantaranya :
   a. Meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
   b. Meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan :

1. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan persampahan, sistem drainase dan sanitasi lingkungan
2. Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi saluran primer, sekunder dan tersier yang digunakan untuk pembuangan air hujan.
3. Sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan menerapkan sistem sanitasi komunal pada kawasan permukiman padat penduduk;

b. Pengendalian sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri, jasa dan rumah sakit;
c. Pengembangan jaringan perpipaan air limbah cair domestik dan sistem pengolahan limbah cair domestik pada kawasan peruntukan permukiman terpadu di perkotaan; dan
d. Pengendalian dan pengembangan sistem pembuangan limbah domestik dengan menyediakan pengolah limbah setempat pada lingkungan perumahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan perdagangan.

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Penetapan lokasi dan pengembangan permukiman fungsi perkotaan dan perdesaan;
b. Penetapan lokasi dan penataan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman fungsi perkotaan;
c. Penataan tata guna fungsi lahan dan intensitas pemanfaatan ruang:
d. Pengembangan sarana prasarana dasar permukiman perkotaan dan perdesaan;
e. Pengendalian daya tamping dan daya dukung lingkungan pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan permukiman;dan
f. Menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan

2. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kabupaten dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan ikim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu

peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kabuapten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
3. Kurangnya penyediaan sanitasi yang baik dan berkelanjutan
4. Masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni
5. Masih ada nya kawasna maupun lingkungan kumuh.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
    a) Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
    b) Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoaan.
    c) Menurunnya kualiatas lingkungan karena adanya permukiman liar dan kumuh.
    d) Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.
2. Kajian Lingkungan Hidup
    a) Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
    b) Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga

mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Belum optimalnya penanganan kawasan rawah kumuh yang ada di Kabupaten Nganjuk;
2. Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalampembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.
6. Kerusakan lingkungan hidup

   Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan dan pedesaan yang tidak terkendali.Misalnya, penebangan hutan secara liar menyebabkan sulitnya memperoleh sumber air bersih.
7. Masih adanya masalah pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi;
8. Pelaksanaan proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda disebabkan

permintaan masyarakat terhadap ganti kerugian tanah yang belum sesuai dengan harga pasar;

9. Langkah-langkah Penanganan penyelesaian sengketa tanah dalam proses pengkajian, koordinasi serta sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan pertanahan belum berjalan secara efisien dan efektif.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melalui penentuan visi dan misi KDH dan Wakil KDH terpilih adalah ***"Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman"***

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunn Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat beberapa perubahan pada sasaran dan indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Perubahan indikator sasaran tersebut adalah:

- Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan, mulai tahun 2022 diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Persentase sistem air limbah skala rumah tangga / komunitas / Kawasan / kota, mulai tahun 2022 diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Persentase Pemenuhan drainase lingkungan, mulai tahun 2022 diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Persentase pengurangan backlog perumahan, menjadi indikator Program Pengembangan Perumahan.
- Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti, merupakan indikator baru pada sasaran Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan dalam rangka.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Tujuan	Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*			*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman				Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	59,35	63,17	66,99	73,47	81,14	86,15
		1.	Awal	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	80,21	81,26	82,31	96,7	-	-
			Perubahan	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	2. Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/kawasan/kota	53,36	58,25	61,14	64,03	-	-

No	Tujuan	Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*			*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					3. Persentase pemenuhan drainase lingkungan/kawasan/ kota	85,46	86,87	88,28	89,69	-	-
					4. Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	75,70	76,95	78,20	79,45	-	-
					5. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	0	12,5	25	37,5	47,5	58,5
					6. Persentase ketersediaan rumah layak huni	87,21	88,96	90,71	92,46	92,96	93,21
		2.	Awal	Meningkatnya Perumahan yang berkualitas	1. Persentase pengurangan backlog perumahan	11,2	11,06	10,92	10,78	-	-
			Perubahan	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	1. Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dari tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)			
MISI : Misi 6 **Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1. Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	1. Mengembangkan perumahan yang layak huni	1. Tersedianya Perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau
			2. Perumahan yang didukung PSU yang baik
	2. Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	1. Menidaklanjuti permasalahan pertanahan asset pemerintah daerah	1. Iventarisasi asset-aset pemerintah daerah
			2. Sertifikasi tanah-tanah asset pemerintah daerah

BAB VI
PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Program dan kegiatan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nganjuk yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana berikut :

Tabel VI.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	**1**	**04**	**01**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	**95%**	**95%**	**140.000.000**	**95%**	**140.000.000**	**-**	**-**	-	-	-	-	-		
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		95%	95%	25.000.000	95%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		95%	95%	12.500.000	95%	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-		
							Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		95%	95%	10.000.000	95%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase sistem air limbah skala					Penyediaan alat tulis kantor		95%	95%	12.500.000	95%	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-		

		rumah tangga/komunitas/kawasan/kota					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		95%	95%	12.500.000	95%	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		95%	95%	8.000.000	95%	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase pemenuhan drainase lingkungan					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		95%	95%	8.000.000	95%	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		95%	95%	7.000.000	95%	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan					Penyediaan makanan dan minuman		95%	95%	22.500.000	95%	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		95%	95%	10.000.000	95%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase pengurangan kawasan kumuh					Monitoring, evaluasi, dan pelaporan		95%	95%	7.000.000	95%	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan peralatan dan bahan pembersih		95%	95%	5.000.000	95%	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	**04**	**01**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi**	**100%**	**100%**	**910.000.000**	**100%**	**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan kendaraan dinas/operasional		100%	100%	160.000.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan peralatan gedung kantor		100%	100%	75.000.000	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan mebeleur		100%	100%	90.000.000	100%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	100%	185.000.000	100%	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		100%	100%	200.000.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

							Penataan Lingkungan Kantor		100%	100%	200.000.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penambahan daya listrik		100%	100%	-	100%	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	**04**	**01**	**03**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Rata-rata nilai SKP ASN**	**Baik**	**Baik**	**100.000.000**	**Baik**	**150.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-
							Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN		Baik	Baik	50.000.000	Baik	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Kegiatan Peningkatan sumber daya aparatur		Baik	Baik	50.000.000	Baik	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	**04**	**01**	**05**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**15.000.000**	**7 Dokumen**	**15.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		3 dok	3 dok	6.000.000	3 dok	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyusunan pelaporan Keuangan		2 Dok	2 Dok	4.000.000	2 Dok	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyusunan Pelaporan Standart Pelayanan Minimal		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyusunan Standart Operasional Prosedur		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	**04**	**01**	**06**	**Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan**	**Pelayanan Penyediaan Infrastuktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan**			**5.975.000.000**		**6.300.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-

							Biaya Pendukung Pengelolaan Kegiatan Infrastruktur Permukiman		95%	95%	300.000.000	95%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Kegiatan Pendukung Insfrastruktur Permukiman		100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pelayanan air minum	842.699 jiwa	851.547 jiwa	600.000.000	860.489 jiwa	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Pengembangan Sistem Pelayanan air limbah	Pelayanan air limbah domestik	581.689 jiwa	598.500 jiwa	600.000.000	615.796 jiwa	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Pemberdayaan Komunitas Insfrastruktur Permumukiman	Kelompok HIPPAM	72 HIPPAM	79 HIPPAM	100.000.000	86 HIPPAM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Pembangunan dan rehabilitasi Jalan Lingkungan	Pelayanan jalan lingkungan	2.071,15 Km	2.081,15	1.750.000.000	2.091,15 Km	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase	Pelayanan drainase lingkungan	297.785 jiwa	312.785 jiwa	2.025.000.000	327.785 jiwa	2.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Pelayanan pemakaman	Pelayanan pemakaman	4 makam	6 makam		8 makam		-	-	-	-	-	-	-		-
							Pembangunan, pemeliharaan Fasum Pemakaman		4 makam	6 makam	300.000.000	8 makam	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
							Kegiatan pendukung sarana fasilitas umum			100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
	Meningkatnya perumahan yang berkualitas	Persentase rumah layak huni					**Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan**	**Persentase rumah layak huni dan terjangkau**	**87,21%**	**88,96%**	**17.200.000.000**	**90,71 %**	**17.350.000.000**	-	-	-	-	-	-	-		-
							Biaya Pendukung Pengelolaan Kegiatan Lingkungan sehat Perumahan		95%	95%	1.200.000.000	95%	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-
		Persentase pengurangan backlog perumahan					Kegiatan pendukung Lingkungan sehat Perumahan		100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-

							Peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau		87,21%	88,96%	12.750.000.000	90,71%	12.900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pembangunan dan rehabilitasi PSU perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	77 Perumahaan	87 perumahan	2.000.000.000	97 perumahan	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Peningkatan Kinerja UPTD	**UPTD dengan tingkat kinerja baik**	**100%**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**150.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-
							Biaya Pendukung Pengelolaan Kegiatan UPT		95%	95%	25.000.000	95%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Kegiatan pendukung UPT		100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur UPT			100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel VI.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2023

Sasaran	Indikator sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
									Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2023					
										Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase penguranganLuasan Kawasan Kumuh	**1**	**3**	**3**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**842.699 jiwa**	**persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : pelayanan air minum**	**1.096.148 jiwa**	**4.937.197.230**	-	-	-		-	-	**1.096.148 jiwa**	**4.937.197.230**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	3	3	2.01		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota		persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : pelayanan air minum	**1.096.148 jiwa**	4.937.197.230	-	-	-		-	-	**1.096.148 jiwa**	4.937.197.230	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	3	2.01	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM		terlaksananya biaya umum DAK bidang air minum	1 Tahun	93.120.700	-	-	-		-	-	1 Tahun	93.120.700	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
	Persentase ketersediaan rumah layak huni	1	3	3	2.01	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan /perbaikan SPAM		terlaksananya biaya umum DAK bidang air minum tersedianya BOP PAMSIMAS	1 Tahun 1 Tahun	188.768.100	-	-	-		-	-	1 Tahun 1 Tahun	188.768.100	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Pipanisasi air minum Desa Klodan Terlaksananya hibah/bansos PAMSIMAS	7 paket 1 paket 2 paket	4.547.163.080	-	-	-		-	-	7 paket 1 paket 2 paket	4.547.163.080	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	3	3	2.01	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintahan desa dan kelompok masyarakat		Terlaksananya pembinaan HIPPAM	1 Tahun	108.145.350	-	-	-		-	-	1 Tahun	108.145.350	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
Meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	**1**	**3**	**5**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah**	**581.689 jiwa**	**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : pelayanan air limbah domestik**	**725.815 jiwa**	**265.694.550**	**-**	**-**	-		-	-	**725.815 jiwa**	265.694.550	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	3	5	2.01		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota		Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : pelayanan air limbah domestik	725.815 jiwa	265.694.550	-	-	-		-	-	725.815 jiwa	265.694.550	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Air Limbah Domestik (ALD)	1 Tahun	24.606.750	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	1 Tahun	24.606.750	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Terlaksananya Biaya Umum DAK Bidang Sanitasi	1 Tahun	18.953.000	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	1 Tahun	18.953.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	5	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Terlaksananya Biaya Umum DAK Bidang Sanitasi Terlaksananya BOP Sanitasi Terlaksananya Dana Penunjang DAK APBN 2021 Terlaksananya pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) tematik penanggulangan kemiskinan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 7 paket	222.134.800	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 7 paket	222.134.800	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**3**	**6**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**297.785 jiwa**	**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : Pelayanan drainase lingkungan**	**297.800 Jiwa**	**3.774.150.400**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**297.800 Jiwa**	**3.774.150.400**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : Pelayanan drainase lingkungan	297.800 Jiwa	3.774.150.400	-	-	-		-	-	297.800 Jiwa	3.774.150.400	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Drainase Kec. Nganjuk	1 Tahun	235.350.400	-	-	-		-	-	1 Tahun	235.350.400	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Terlaksananya Drainase RT 002/004/005 RW 001 Dusun Karangrejo Kel. Kapas	1 paket	3.538.800.000	-	-	-		-	-	1 paket	3.538.800.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Barito IA	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Barito V	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Gatot Subroto Warujayeng (Lanjutan)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Panglima Sudirman I (Belakang KODIM)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Supriyadi Desa Kudu (PIKK)	1 paket								1 paket			

									Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Citarum III A Kelurahan Kauman	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Keliling Pasar Ngronggot (PIKK)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Sukomoro (PIKK)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase Plat Beton Desa Jampes Kec. Pace (PIKK)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Drainase / Saluran Pembuangan Dsn. Plosorejo (PIKK)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Jalan Poros Ds. Balong Pacul (PIKK)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Tepi Jalan Ruas Rejoso - Ngangkatan (PIKK)	1 paket								1 paket			
		1	**3**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**2.071,15 Km**	**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : Pelayanan jalan lingkungan**	**2086 km**	**29852920000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**2086 km**	**29.852.920.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu : Pelayanan jalan lingkungan	2086 km	**29.852.920.000**	-	-	-		-	-	2086 km	**29.852.920.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	3	1 0	2.0 1	5	Pembangunan Jalan		Terlaksananya Pavingisasi Jalan Desa Balonngrejo ke Desa Gejakan	1 paket	29.852.920.000	-	-	-		-	-	1 paket	29.852.920.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
									Terlaksananya Pavingisasi Jalan Dusun Bulung sampai Kedungkajar Desa Ngumpul Kecamatan Bagor	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pavingisasi Jalan Kartini IV Kelurahan Warujayeng (Lanjutan)	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan Jl. Anjuk Ladang IA RT.01 RW.07 Kel. Ploso, Nganjuk	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan Jl. Letjen Suprapto IC RT. 06 RW. 06 Kel.Ploso, Nganjuk	1 paket		-	-	-		-	-	1 paket		Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
									Terlaksananya Pavingisasi Jalan Perumahan di Desa Klurahan RW II Kecamatan Ngronggot	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pavingisasi Jl. Poros Kelurahan Lingkungan RW 08 - RW 09 Kel. Sukomoro	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pavingisasi Lingkungan Dusun Kandangrejo Ds. Paron Kecamatan Bagor	1 paket								1 paket			
									Terlaksananya Pavingisasi RT 01 RW 17 Kelurahan Banaran Kertosono	1 paket		-	-	-		-	-	1 paket		Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

									Terlaksananya Pavingisasi RT 02 Kaplingan Desa Pelem Kertosono Terlaksananya Paving Lingkungan Pasar Lengkong (PIKK) Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata-pedestrian koridor Jl. A. Yani (DID) dan sekitarnya	1 paket 1 paket 1 paket							1 paket 1 paket 1 paket			
		1	**4**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**90%**	**6.609.906.960**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**90%**	**8.496.111.710**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**90%**	**7.931.820.627**	**90%**	**23.037.839.297**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	**4**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**3 dokumen**	**20.840.000**	**Dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**9 dokumen**	**101.252.000**	**Dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**9 dokumen**	**40.000.000**	**7 Dokumen**	**162.092.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	11.340.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	**16.340.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.188.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	**15.188.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-	-	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan	1 dokumen	10.188.000	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	**15.188.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

												hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD			hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		1	4	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-	-	-	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.188.000	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	**15.188.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.188.000	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	**15.188.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	15.400.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	24.660.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	10.000.000	2 laporan	**50.060.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.01	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	5.440.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	24.500.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	**34.940.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**2 dokumen**	**5.887.726.000**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**6 dokumen**	**6.797.614.000**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**6 dokumen**	**6.793.690.000**	**6 dokumen**	**19.479.030.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5.881.806.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 ASN	6.783.690.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 ASN	6.783.690.000	58 ASN	**19.449.186.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	2.960.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 Laporan	7.252.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	**15.212.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran	1 Tahun	2.960.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	6.672.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	**14.632.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**		**-**	**-**	**-**	**Jumlah Dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**Jumlah Dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**	**-**	**0**	**-**	**0**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		**-**	**-**	**-**	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30.000.000	-	-	0	-	**0**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

													pada SKPD							
		1	**4**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tingkat Kehadiran ASN**	**100%**	**9.600.000**	**Jumlah Kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dipenuhi**	**58 orang**	**56.000.000**	**Jumlah Kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dipenuhi**	**54 orang**	**10.000.000**	**54 orang**	**75.600.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	Jumlah paket pakaian dinas beserta attribut kelengkapan	1 paket	46.400.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta attribut kelengkapan	-	0	-	**46.400.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya pelaksanaan senam kesegaran jasmani	1 Tahun	9.600.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	58 orang	9.600.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	10.000.000	54orang	**29.200.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**95%**	**296.025.460**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**3 Paket**	**461.533.810**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**3 Paket**	**317.000.000**	**3 paket**	**1.074.559.270**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	8.483.400	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14.983.500	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	1 paket	**33.466.900**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian Terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan pembersih	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	90.806.900	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	147.326.310	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	100.000.000	1 paket	338.133.210	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	58.971.160	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	45.743.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.000.000	1 paket	144.714.160	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	6.500.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	6.900.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	7.000.000	3 dokumen	20.400.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu	1 Tahun	6.145.000	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 laporan	13.710.000	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 laporan	5.000.000	3 laporan	24.855.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun 1 Tahun	122.694.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	227.876.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	12 laporan	500.570.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Terlaksananya pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	1 Tahun	2.425.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	4.995.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	12.420.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	-	0	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**65 unit**	**492.148.250**	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**65 unit**	**260.130.627**	**65 unit**	752.278.877	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**

		1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	50.000.000	-	0	0	2 Unit	50.000.000	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1Unit	35.000.000	-	0	0	1Unit	35.000.000	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		-	-	-	Jumlah paket mebel yang disediakan	57 unit	149.692.400	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	30.000.000	59 unit	179.692.400	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	257.455.850	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9 unit	230.130.627	7 Unit	487.586.477	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**95%**	**116.900.000**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**168.000.000**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**80.000.000**	**100%**	364.900.000	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	116.900.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	168.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	364.900.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi**	**100%**	**278.815.500**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**9 unit**	**389.563.650**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**9 unit**	**431.000.000**	**9 unit**	1.099.379.150	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**

		1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	1 Tahun 1 Tahun	50.594.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	64.993.200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.000.000	1 unit	165.587.700	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun 1 Tahun	123.461.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	211.994.250	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	150.000.000	3 unit	485.455.850	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun 1 Tahun	24.959.400	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4 unit	30.208.200	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4 unit	31.000.000	4 unit	86.167.600	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket 1 paket	79.800.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan/ rehabilitasi	1 unit	82.368.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan/rehabilitasi	1 unit	200.000.000	1 unit	362.168.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**2**			**Program Pengembangan Perumahan**		**Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial**	**90%**	**18.330.000**	**Persentase pengurangan backlog rumah**	**95%**	**23.475.000.000**	**Persentase pengurangan backlog rumah**	**95%**	**1.750.000.000**	**95%**	**25.243.330.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**2**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial**	**90%**	**18.330.000**	**Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**5 dokumen**	**225.000.000**	**Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**2 dokumen**	**200.000.000**	**2 dokumen**	**443.330.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	2	2.01	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota		-	-	-	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana atau lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	50.000.000	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana atau lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	0	0	0	50.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.01	2	identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		-	-	-	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1 dokumen	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.01	3	pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani		-	-	-	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kabupaten/kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 dokumen	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	4	2	2.01	4	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana		-	-	-	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	1 dokumen	25.000.000	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.01	5	pendataan dan verifikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota		-	-	-	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	1 dokumen	50.000.000	-	-	-	-	**50.000.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Tersedianya BOP Pembangunan Rusun dan Rusus	1 Tahun	18.330.000	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1 dokumen	25.000.000	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	143.330.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**2**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial**	**90%**	**17.980.000**	-	-		**Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial**	**90%**	**250.000.000**	**90%**	**267.980.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.02	4	Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilisator		-	-	-	-	-	-	jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilisator yang terbentuk dan terlatih	6 orang	200.000.000	6 orang	200.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	4	2	2.02	5	Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana		-	-	-	-	-	-	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.02	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Tersedianya BOP Pembangunan Rusun dan Rusus	1 Tahun	17.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.980.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**2**	**2.03**		**pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota**		**Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial**	**90%**	**15.133.504.200**	**jumlah unit rumah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota**	**249 unit rumah**	**23.100.000.000**	**jumlah unit rumah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota**	**80 dokumen**	**600.000.000**	**80 dokumen**	**38.833.504.200**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		-	-	-	-	-	-	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi	12 unit rumah	200.000.000	12 unit rumah	200.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.03	2	penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		-	-	-	Jumlah site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000	Jumlah site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	200.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	4	2	2.03	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembangunan PSU Resettlement Dampak Pembangunan Bendungan Semantok	1 lokasi	14.955.872.000	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terbangun	229 unit rumah	22.900.000.000	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terbangun	48Unit rumah	100.000.000	48Unit rumah	37.955.872.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perumahan Khusus Ds. Sendangbumen Kec. Berbek, Ds. Pisang Kec. Patianrowo, Ds. Sumberkepuh Kec. Lengkong Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Hunian Sederhana (HS)	1 tahun 1 Tahun	177.632.200	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/kota yang dilaksanakan operasionaldan pemeliharaan	20 unit rumah	200.000.000	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/kota yang dilaksanakan operasionaldan pemeliharaan	20 unit rumah	200.000.000	20 unit rumah	577.632.200	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**2**	**2.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial**	**90%**	**22.175.000**				**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**2 dokumen**	**200.000.000**	**2 dokumen**	**222.175.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	2	2.04	2	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota								Jumlah Laporan pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	**100.000.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

															Program Kabupaten/ Kota						
		1	4	2	2.04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tersedianya BOP Pembangunan Rusun dan Rusus	1 tahun	22.175.000				Jumlah dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	**122.175.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**2**	**2.05**		**Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**		-	-	-	**jumlah laporan Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**10 laporan**	**50.000.000**	**jumlah laporan Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**2 dokumen**	**200.000.000**	**2 dokumen**	**250.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	2	2.05	1	fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		-	-	-	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	10 laporan	25.000.000	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 laporan	100.000.000	1 laporan	125.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.05	2	Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus		-	-	-	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	1 laporan	25.000.000	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000		
		1	**4**	**2**	**2.06**		**Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**		**Persentase rumah layak huni dan terjangkau**	**92,46%**	**344.000.000**	**Jumlah dokumen laporan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**15 dokumen**	**100.000.000**	**Jumlah dokumen laporan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**11 dokumen**	**200.000.000**	**11 dokumen**	**644.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**

		1	4	2	2.06	1	fasilitasi pemenuhan konmitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik		-	-	-	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	5 dokumen	50.000.000	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	10 dokumen	100.000.000	10 dokumen	150.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	2	2.06	3	koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Terlaksananya Updating Inventarisasi Data Perumahan Kabupaten Nganjuk	1 tahun 1 dokumen	344.000.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	10 laporan	50.000.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	494.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**2**	**2.07**		**Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)**		-	-	-	-	-	-	**Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	2	2.07	1	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)		-	-	-	-	-	-	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**3**			**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase rumah layak huni dan terjangkau**	**92,46%**	**3.312.164.200**	**Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**97%**	**3.417.901.200**	**Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**97%**	**342500 0000**	**97%**	**10.155. 065.400**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**3**	**2. 01**		**Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**		**-**	**-**		**Jumlah dokumen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**1 Dokumen**	**150.000 .000**	**Jumlah dokumen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**1 Dokumen**	**25.000. 000**	**1 Dokumen**	**175.000 .000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		1	4	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik					Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	50.000.000	-	0	0	0	50.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		-	-		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	1 Laporan	100.000. 000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	125.000. 000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**3**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Persentase rumah layak huni dan terjangkau**	**92,46%**	**65.842.200**	**Jumlah laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**1 laporan**	**200.000.000**	**Jumlah laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**1 laporan**	**100.000.000**	**1 laporan**	365.842.200	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.02	1	Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		-	-		Jumlah hasil Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah hasil Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		-	-		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000	-	-	0	-	50.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.02	3	Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyrakat di permukiman kumuh		**-**	**-**		Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	1 laporan	100.000.000	**-**	**-**	0	**-**	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Tersedianya BOP Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 tahun	65.842.200	-	-		**-**	**-**		**-**	**65.842.200**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**3**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah**	**152 rumah**	**3.246.322.000**	**Pesentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**97%**	**3.067.901.200**	**Pesentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**97%**	**3.490.000.000**	**97%**	**9.804.223.200**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Terlaksananya kegiatan DAK penugasan Bidang Perumahan dan tercukupinya biaya penunjang DAK penugasan Bidang Perumahan	152 rumah	3.043.322.000	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	25 unit rumah	250.000.000	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	30 unit rumah	450.000.000	30 unit rumah	3.743.322.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Tersedianya BOP DAK Bidang Perumahan	1 tahun	203.000.000	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	250.000.000	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	65.000.000	1 laporan	518.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.03	6	pelaksanaan pembangunan/pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		-	-		luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	15 Ha	2.467.901.200	luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	15 Ha	2.975.000.000	15 Ha	5.442.901.200	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.03	7	pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh		-	-		Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000	-	-	0	-	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	3	2.03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	100 Unit	1500000000	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	100 Unit	1500000000	100 Unit	3.000.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**4**			**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Persentase rumah layak huni dan terjangkau**	**92,46%**	**4.200.000.000**	**Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh**	**95%**	**16.297.035.900**	**Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh**	**95%**	**3.110.790.558**	**95%**	**23.607.826.458**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**4**	**2.01**		**Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**		Persentase rumah layak huni dan terjangkau	92,46%	**4.200.000.000**	**jumlah unit rumah Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**	820 unit rumah	**16.297.035.900**	**jumlah unit rumah Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**	157 unit rumah	**3.110.790.558**	157 unit rumah	**23.607.826.458**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	4	2.01	1	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Tersedianya BANSOS RTLH untuk 228 Penerima Bantuan di Kabupaten Nganjuk Tersedianya BOP BSPS Tersedianya BOP Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	228 unit 1 Tahun 1 Tahun	4.200.000.000	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	820 unit rumah	16.297.035.900	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	157 unit rumah	3.110.790.558	157 unit rumah	23.607.826.458	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**5**			**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**92%**	**676.282.100**	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**100%**	**2.175.000.000**	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**100%**	**2.475.000.000**	**100%**	**5.326.282.100**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**5**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**92%**	**676.282.100**	**Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**5 Lokasi**	**2.175.000.000**	**Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**7 Lokasi**	**1.285.000.000**	**7 Lokasi**	**4.136.282.100**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	5	2.01	1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan		Jumlah dokumen Perencanaan penyediaan PSU perumahan		60.000.000	Jumlah dokumen Perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah dokumen Perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	235.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang		Terlaksananya Paving dan Urug Parkir Makam Jl. Bengawan Solo RT.04 / RW.04	300 m	524.670.000	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasrana,	5 Lokasi	2.075.000.000	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasrana,	7 Lokasi	835.000.000	7 Lokasi	3.434.670.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

							Fungsi Hunian		(PIKK) Terlaksananya Pengurugan Tanah Makam di Kelurahan Begadung (PIKK)	7000 m		sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian			sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian					
		1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Tersedianya BOP Pelimpahan PSU Tersedianya BOP PISIEW	1 Tahun 1 Tahun	91.612.100	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana,dan utilitas umum perumahan	3 laporan	75.000.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana,dan utilitas umum perumahan	1 laporan	150.000.000	1 laporan	316.612.100	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	5	2.01	4	Verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari pengembang		-	-	-	-	-	-	Jumlah laporan hasil serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari pengembang	5 laporan	150.000.000	5 laporan	150.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	**4**	**6**			**Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**		-	-	-	**Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan**	**100%**	**25.000.000**	**Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**125.000.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		1	**4**	**6**	**2.01**		**Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perangcangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil**		-	-	-	**Jumlah Laporan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perangcangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil**	**5 laporan**	**25.000.000**	**Jumlah Laporan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perangcangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**1 dokumen**	**125.000.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		1	4	6	2.01	1	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil		-	-	-	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	5 laporan	25.000.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	1 laporan	100.000.000	1 laporan	125.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	**10**	**4**			**Program Penyelesaian sengketa tanah garapan**		-	-	-	**Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan**	**100%**	**50.000.000**	**Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**100.000.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	**10**	**4**	**2.01**		**Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota**		-	-	-	**Jumlah Dokumen Hasil Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**1 dokumen**	**50.000.000**	**Jumlah Dokumen Hasil Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**1 dokumen**	**50.000.000**	**1 berita acara**	**100.000.000**	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		2	10	4	2.01	2	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		-	-	-	Jumlah Berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 berita acara	50.000.000	Jumlah Berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 berita acara	50.000.000	1 berita acara	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	**10**	**5**			**Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**					**Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan**	**100%**	**100.000.000**	**Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	**10**	**5**	**2.01**		**Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota**					**Jumlah Dokumen Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota**	**4 Dokumen**	**100.000.000**	**Jumlah Dokumen Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota**	**4 Dokumen**	**100.000.000**	**4 Dokumen**	**200.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	10	5	2.01	1	Penetapan daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota					Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen	50.000.000	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	2 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

							Kabupaten/ kota					Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		2	**10**	**6**			**Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan maksimum dan tanah Absentee**					**Persentase registribusi tanah, dang anti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**100%**	**350.000.000**	**Persentase registribusi tanah, dang anti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**100%**	**350.000.000**	**-**	**700.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	**10**	**6**	**2.01**		**Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota**					**Jumlah Dokumen Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota**	**14 Dokumen**	**350.000.000**	**Jumlah Dokumen Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota**	**14 Dokumen**	**350.000.000**	**14 Dokumen**	**700.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	10	6	2.01	1	Inventarisasi subjek dan objek Redistribusi Tanah					Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Dokumen	250.000.000	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Dokumen	250.000.000	10 Dokumen	500.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

		2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/ kota					Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan ***Landreform*** dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan ***Landreform*** dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	10	6	2.01	4	Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ kota					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	**10**	**8**			**Program Pengelolaan Tanah Kosong**					**Persentase tanah kosong yang dikelola**	**95%**	**300.000.000**	**Persentase tanah kosong yang dikelola**	**95%**	**300.000.000**	**-**	**600.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	**10**	**8**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah tanah kosong**					**Jumlah laporan Penyelesaian Masalah tanah kosong**	**12 Laporan**	**300.000.000**	**Jumlah laporan Penyelesaian Masalah tanah kosong**	**12 Laporan**	**300.000.000**	**-**	**600.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	10	8	2.01	1	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	12 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	12 Laporan	300.000.000	-	600.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	**10**	**8**	**2.02**		**Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**					**Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**	**10 Dokumen**	**250.000.000**	**Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**	**10 Dokumen**	**250.000.000**	**-**	**500.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**

		2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan tanah kosong					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	10 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	10 Dokumen	250.000.000	-	500.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	**10**	**10**			**Program Penatagunaan Tanah**		-	-	-	**Persentase perencanaan penggunaan tanah**	**95%**	**50.000.000**	**Persentase perencanaan penggunaan tanah**	**95%**	**50.000.000**	**95%**	**100.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota**		-	-	-	**Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota**	**3 Dokumen**	**50.000.000**	**Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota**	**2 Dokumen**	**50.000.000**	**2 Dokumen**	**100.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
		2	10	10	2.01	1	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah		-	-	-	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	3 Dokumen	50.000.000	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
		2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1 Indikator Kinerja Utama

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun - 0	Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	$\frac{\text{Persentase IKK 1} + \text{IKK 2} + IKK\ 3}{3}$	56,16	59,41	62,37	80,05	80,15	83,9	83,9

VII.2 Indikator Kinerja Kunci

Tabel VII.2

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019-2023

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun - 0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten (Ha)}}{\text{Luas total kawasan kumuh yang ditetapkan di Kabupaten (Ha)}} \times 100\%$	0	12,5	25	37,5	47,5	58,5	58,5
2.	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di suau wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)}} \times 100\%$	87,21	88,96	90,71	92,46	92,96	93,21	93,21
3.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah permasalahan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam 1 tahun}} \times 100\%$	-	-	-	-	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nganjuk. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Nganjuk, 27 Juli 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PRKPP

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013